

BAB I

PENDAHULUAN

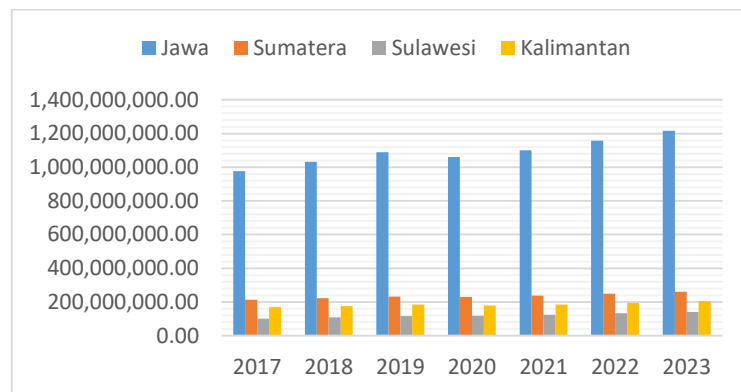
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah dasar utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator keberhasilannya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau nilai Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat wilayah atau provinsi. Menurut Badan Pusat Statistik (2024) PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Salah satu tujuan utama pembangunan Indonesia adalah meningkatkan perekonomian. Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha mencapai perekonomian yang stabil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata.

Pulau Jawa, sebagai pusat perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu sangat penting dalam mencapai target nasional. Berdasarkan pada proyeksi pemerintah dan Bank Indonesia, ekonomi di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkat sebesar 5,0 % hingga 5,5% di tahun 2023. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada setiap periode, daerah di wilayah regional ini selalu berusaha untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri untuk mencapai kesejahteraan. Harapannya, masyarakat sejahtera tercipta ketika setiap individu memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi serta kesempatan kerja yang layak dan pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perekonomian.

Ditinjau dari informasi pada Badan Pusat Statistik (BPS), hingga saat ini Pulau Jawa masih menjadi daerah yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian yang menyumbang sekitar 58% terhadap PDB nasional. Hal ini terjadi karena Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang memiliki populasi terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 154,34 juta jiwa berdasarkan dari hasil pencatatan Dukcapil. Hal ini berarti terdapat pasar domestik yang besar untuk berbagai produk dan jasa. Namun, dibalik keunggulan tersebut Pulau Jawa juga menghadapi beberapa permasalahan yang dapat menghambat pada perekonomian.

Permasalahan klasik di dalam pembangunan ekonomi adalah ketimpangan antar wilayah. Banyak daerah di Pulau Jawa yang masih tertinggal dalam hal akses terhadap layanan dasar. Jika dibandingkan dengan pulau lain seperti Sumatra dan Kalimantan, tentunya ada karakteristik yang berbeda dalam hal pertumbuhan ekonomi. Pulau Sumatra yang kaya akan sumber daya alam, namun sering menghadapi tantangan infrastruktur dan ketidakstabilan politik yang menghambat pembangunannya. Sementara itu, Pulau Kalimantan memiliki sumber daya alam yang besar, namun seringkali terhambat oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Meskipun masing-masing pulau memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB nasional tetap menjadi yang terbesar dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Adapun data mengenai PDRB pada empat pulau di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

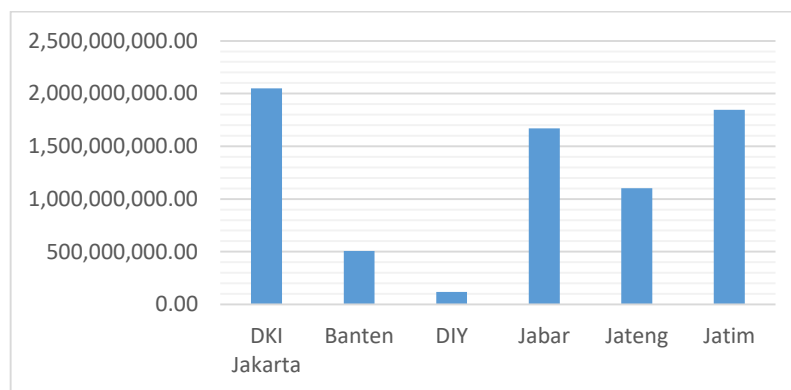
Gambar 1.1 Rata-rata PDRB Empat Pulau di Indonesia

Tahun 2017-2023 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata PDRB Pulau Jawa paling tinggi dibandingkan pulau lainnya. Pada tahun 2017, rata-rata PDRB Pulau Jawa tercatat sebesar 976,25 juta rupiah dan terus meningkat menjadi 1.215,55 juta rupiah pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga kepadatan penduduk yang tinggi ini menjadikan pasar domestik yang besar dengan mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi. Selain itu juga, Pulau Jawa sebagai pusat bisnis, industri, jasa, dan pemerintahan, sehingga mendukung pengembangan ekonomi di wilayah ini yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya PDRB. Namun, pada tahun 2020 rata-rata perekonomian Pulau Jawa mengalami penurunan yang diakibatkan oleh dampak COVID-19. Sementara itu, meskipun Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi juga menunjukkan tren peningkatan ekonomi, namun kontribusinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Pulau Jawa.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan

Jawa Timur yang tentunya memiliki nilai perekonomian berbeda di setiap provinsinya. Perbedaan nilai perekonomian ini mencerminkan adanya ketimpangan wilayah di Pulau Jawa yang dapat menghambat pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, untuk melihat ketimpangan yang ada, berikut terdapat gambar data PDRB setiap provinsi di Pulau Jawa tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.2 PDRB di Pulau Jawa Tahun 2023 (Juta Rupiah)

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa DKI Jakarta mencatatkan PDRB tertinggi dibandingkan provinsi lainnya yaitu sebesar 2.050,46 juta rupiah pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor perekonomian, jasa, industri, perdagangan, dan keuangan yang kuat. Sebagai pusat keuangan, banyak keuntungan dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang memang dilaporkan dan dicatat di provinsi DKI Jakarta. Hal ini tentu dapat mempengaruhi tingginya PDRB untuk daerah tersebut.

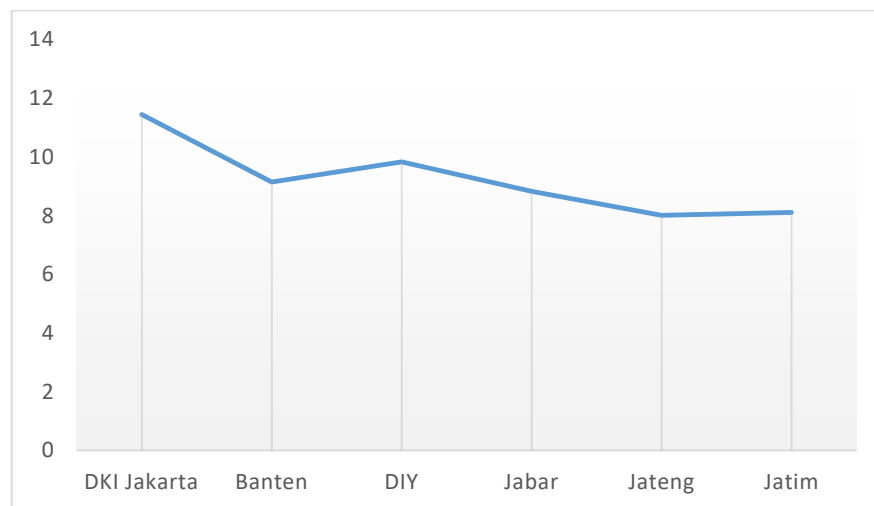
Kemudian disusul oleh provinsi Jawa Timur dengan kontribusi PDRB sebesar 1.844,80 juta rupiah di tahun 2023. Jawa Timur dikenal sebagai salah satu pusat industri manufaktur dan perdagangan di Indonesia. Selain itu, sektor agrikultur dan UMKM juga memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi di Provinsi ini. Posisi

ketiga diduduki oleh provinsi Jawa Barat dengan nilai PDRB di tahun 2023 sebesar 1.669,41 juta rupiah. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, potensi ekonomi di provinsi Jawa Barat sangat besar dengan didorong oleh sektor industri, teknologi, dan perdagangan. Posisi selanjutnya diduduki oleh provinsi Jawa Tengah, meskipun pertumbuhan ekonominya stabil, namun memiliki nilai PDRB yang lebih rendah dari ketiga provinsi sebelumnya. Hal ini terjadi karena dibatasi oleh urbanisasi dan infrastruktur yang berkembang lebih lambat dibandingkan ketiga provinsi sebelumnya. Provinsi Banten dan DI Yogyakarta memiliki nilai PDRB terendah di Pulau Jawa karena ketergantungan pada sektor tertentu, sehingga dalam meningkatkan perekonomiannya menjadi lebih terbatas.

Analisis kontribusi pada nilai PDRB menunjukkan perbedaan yang mencolok di Pulau Jawa ini menyoroti pentingnya untuk memahami faktor-faktor yang mendasari dalam mempengaruhi PDRB di wilayah ini. Menurut teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikemukakan oleh Romer (1986) dan Lucas Jr (1988) bahwa pertumbuhan ekonomi itu berasal dari faktor internal seperti pendidikan, inovasi, dan pengetahuan. Jika pendidikan berkualitas dan sumber manusianya pun baik, maka produktivitas dan inovasi akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada *output* ekonomi yaitu PDRB.

Menurut Auliana & Sa'roni (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Artinya ketika rata-rata lama sekolah meningkat, maka PDRB akan meningkat pula. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda Nurul & Indahsari Kurniyati

(2021) yang menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Berikut merupakan data kualitas pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

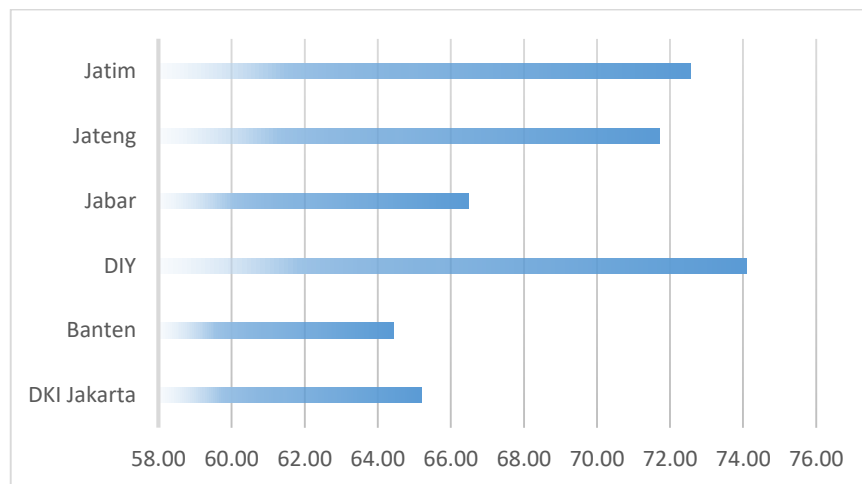
Gambar 1.3 Rata-rata Lama Sekolah di Pulau Jawa Tahun 2023

Pada gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah provinsi DKI Jakarta tertinggi dibandingkan wilayah lain. Hal ini terjadi karena provinsi DKI Jakarta memiliki akses pendidikan yang lebih baik dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas. Provinsi DKI Jakarta juga lebih memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan, didukung dengan kondisi ekonomi yang lebih maju sehingga semakin banyak orang yang ingin melanjutkan sekolah. Lalu, banyak orang dari daerah lain yang datang ke provinsi DKI Jakarta untuk mencari pendidikan yang lebih baik. Hal ini membuat rata-rata lama sekolah di provinsi DKI Jakarta lebih tinggi.

Posisi selanjutnya disusul oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena dikenal sebagai kota pelajar, dengan banyak universitas dan lembaga pendidikan

tinggi yang berkualitas. Hal ini mendorong masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu, provinsi Banten berada di posisi menengah. Meskipun ada kemajuan dalam pendidikan, namun masih terdapat ketimpangan dalam akses pendidikan antar wilayah. Kemudian, pada urutan ketiga terakhir ada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan dalam akses pendidikan. Selain itu terdapat perbedaan dalam budaya dan pola pikir serta kondisi ekonominya.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi nilai PDRB yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK ini sangat penting karena menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Menurut teori pertumbuhan klasik, Smith (1776) menekankan bahwa tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam produksi. TPAK yang tinggi mencerminkan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk produksi, dimana nantinya akan secara langsung berdampak pada peningkatan *output* ekonomi. Idealnya, semakin tinggi TPAK, maka semakin besar pula potensi produktivitas suatu daerah. Namun, di Pulau Jawa ini terdapat fenomena bahwa peningkatan TPAK tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga bisa saja menghambat perekonomian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Najiah (2013) menunjukkan bahwa TPAK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Sedangkan menurut Munawir & Saharuddin (2020) dan Maulana et al. (2023) menyatakan bahwa TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Maka, dalam hal ini perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Adapun gambar grafik TPAK pada provinsi di Pulau Jawa tahun 2023 yaitu sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa
Tahun 2023 (Persen)**

Berdasarkan data pada gambar 1.4 provinsi DI Yogyakarta mencatatkan TPAK tertinggi dari provinsi lainnya. DI Yogyakarta dikenal dengan budaya kewirausahaan yang kuat, juga merupakan tujuan wisata populer yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Diikuti dengan provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang stabil dari tahun ke tahun. Masyarakat provinsi Jawa Timur umumnya memiliki etos kerja yang tinggi dan budaya kerja keras. Hal ini mendorong individu untuk mencari pekerjaan dan berkontribusi pada ekonomi. Lalu, posisi ketiga diduduki oleh provinsi Jawa Tengah, keberadaan industri kecil dan peluang kerja sektor pertanian juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di provinsi ini.

Pada posisi ketiga terakhir ada provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, dimana TPAK ketiga provinsi ini cenderung rendah dari yang lain. Meskipun

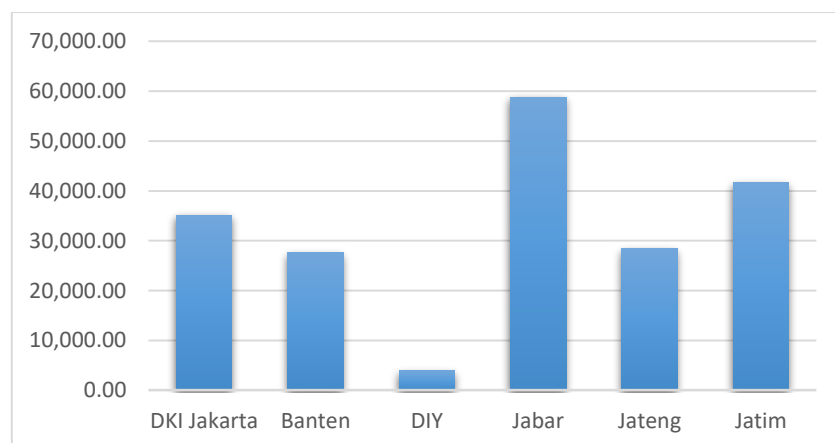
provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sebagai pusat perekonomian dan industri, namun memiliki TPAK yang rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini terjadi karena adanya mobilisasi penduduk yang tinggi ke daerah-daerah tersebut akibat statusnya sebagai pusat ekonomi. Di daerah ini, meskipun banyak penduduk usia kerja, jumlah penduduk yang bekerja cenderung lebih sedikit. Merujuk pada informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, provinsi DKI Jakarta menerima sekitar 250.000 pendatang baru. Di sisi lain provinsi Jawa Barat dan Banten juga banyak didatangi oleh penduduk luar, khususnya karena kedekatannya dengan provinsi DKI Jakarta.

Urbanisasi yang terjadi seringkali menumpuk pada kelompok usia yang seharusnya menjadi bagian dari angkatan kerja. Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten ini menjadi target urbanisasi, menarik banyak imigran dari daerah lain yang mencari peluang kerja. Namun, banyak dari mereka yang belum siap untuk memasuki pasar kerja. Akibatnya, mereka hanya akan menjadi beban sebagai penduduk usia kerja tanpa berkontribusi secara aktif dalam angkatan kerja. Dengan demikian, penduduk usia kerja tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut saja, tetapi juga dipengaruhi oleh banyaknya pendatang yang masuk ke daerah tersebut. Sebaliknya, provinsi DI Yogyakarta tidak menjadi target urbanisasi, sehingga migrasi ke daerah tersebut relatif rendah. Hal ini menjadikan daerah tersebut menciptakan penduduk usia kerja yang lebih siap atas hasil dari pendidikan dan pelatihan yang lebih baik di daerah itu sendiri.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap PDRB adalah infrastruktur. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas, mempermudah akses ke

pasar, dan menciptakan lingkungan investasi yang baik. Terkhusus, pada infrastruktur listrik yang memiliki peran vital untuk mendukung aktivitas ekonomi karena sebagai kebutuhan dasar yang mendukung berbagai sektor. Ketersediaan listrik yang cukup dan berkualitas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu operasional industri serta bisnis yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan PDRB.

Menurut penelitian dari Aldona et al. (2021) infrastruktur listrik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB karena karena listrik mempunyai kaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susana Dewiana Jemumu & Shanty Ratna Damayanti, SE. (2024) menyatakan bahwa infrastruktur listrik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi infrastruktur listrik di Pulau Jawa, berikut ini disajikan grafik data di bawah ini mengenai infrastruktur listrik di Pulau Jawa tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.5 Infrastruktur Listrik di Pulau Jawa Tahun 2023 (GWh)

Berdasarkan pada data yang tersaji di atas, terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat mencatat konsumsi listrik tertinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini terjadi karena provinsi Jawa Barat memiliki populasi terbesar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, kebutuhan listrik untuk rumah tangga, sektor komersial, dan fasilitas umum menjadi sangat besar. Selain itu, provinsi Jawa Barat juga sebagai pusat perekonomian dan industri yang tentunya akan membutuhkan penggunaan listrik dalam jumlah besar untuk keperluan produksi dan operasional. Setelah itu, posisi kedua ditempati oleh provinsi Jawa Timur, karena menjadi pusat aktivitas industri serta perdagangan di bagian timur Pulau Jawa yang mendorong tingginya penggunaan listrik di provinsi ini.

DKI Jakarta menempati posisi ketiga dalam penggunaan listrik di Pulau Jawa. Meskipun provinsi DKI Jakarta ini sebagai pusat pemerintahan dan bisnis terbesar di Indonesia, tingginya biaya lahan dan terbatasnya ruang untuk pengembangan industri membuat sebagian besar aktivitas industri telah bergeser ke wilayah-wilayah sekitar, terutama provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, penggunaan listrik di provinsi DKI Jakarta lebih banyak didorong oleh kebutuhan rumah tangga dan bisnis perkantoran. Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta berada pada posisi ketiga terakhir dalam penggunaan listrik di Pulau Jawa yang relatif rendah. Provinsi Banten dan Jawa Tengah mengalami peningkatan penggunaan listrik, terutama di kawasan urban dan industri, meskipun aktivitas industrinya tidak sebesar di provinsi Jawa Barat atau Jawa Timur. Di sisi lain, DI Yogyakarta memiliki konsumsi listrik terendah, karena daerah ini lebih dikenal sebagai pusat

pendidikan dan budaya, dengan sektor industri yang lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya.

Pada fenomena di atas, terlihat bahwa terdapat permasalahan ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan, ketidakcocokan kompetensi tenaga kerja, serta ketimpangan dalam pasokan listrik dapat berdampak pada kesenjangan ekonomi antar provinsi di Pulau Jawa. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena meskipun Pulau Jawa menjadi pusat ekonomi Indonesia, ketimpangan antara wilayah bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ada perbedaan hasil dan ketidaksesuaian antara pandangan teori pada penelitian sebelumnya yang menggambarkan bahwa kualitas pendidikan, TPAK, dan infrastruktur listrik dapat mempengaruhi PDRB.

Penulis tertarik mengkaji menggunakan pendekatan pada tiga variabel utama yaitu, rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan infrastruktur listrik. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu atau dua variabel, tetapi kajian tentang bagaimana ketiga variabel ini berinteraksi satu sama lain dalam mendorong PDRB di Pulau Jawa masih terbatas. Lalu, adanya keterkaitan antara pendidikan dan TPAK penelitian ini berpotensi menyoroti masalah “*mismatch*” antara pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan kualitas tenaga kerja di pasar kerja pada Pulau Jawa, yang jarang dibahas secara mendalam yang dapat memberikan pandangan baru mengenai potensi ketidakefisienan sistem pendidikan dan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan uraian fenomena, permasalahan, perbedaan pada hasil penelitian terdahulu, serta kebaruan yang ada untuk membuktikan bagaimana faktor-faktor

yang telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Infrastruktur Listrik terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa Tahun 2017-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan infrastruktur listrik secara parsial terhadap produk domestik regional bruto di Pulau Jawa tahun 2017-2023?
2. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan infrastruktur listrik secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto di Pulau Jawa tahun 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan infrastruktur listrik secara parsial terhadap produk domestik regional bruto di Pulau Jawa tahun 2017-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan infrastruktur listrik secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto di Pulau Jawa tahun 2017-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, khususnya melalui analisis terhadap PDRB di Pulau Jawa.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Untuk untuk menambah wawasan dan literatur mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan infrastruktur listrik terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2017-2023. Selain itu menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang relevan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dapat menjadi sumber dan referensi bagi peneliti selanjutnya baik dalam lingkungan kampus maupun luar. Diharapkan juga dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi para pemangku kebijakan agar dapat membuat kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB suatu wilayah.

1.5 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Pulau Jawa dengan enam provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan mengakses *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

No	Keterangan	2024																2025											
		Sept				Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan dan Konsultasi Judul																												
2	ACC Judul																												
3	Penyusunan Proposal Skripsi dan Bimbingan																												
4	Seminar Proposal Skripsi																												
5	Revisi Proposal Skripsi																												
6	Penyusunan Skripsi dan Bimbingan																												
7	Sidang Skripsi																												
8	Revisi Skripsi																												